

## BAB IV

### DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran Umum PMII Nasional

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah lama dikenal sebagai salah satu kekuatan dari gerakan-gerakan mahasiswa di Indonesia. Dengan usia yang tidak lagi muda, PMII telah melewati atau bahkan ikut berperan dalam sejarah kehidupan politik sosial dan budaya di Indonesia. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa gerakan-gerakan mahasiswa tidak akan pernah lepas dari dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemunculan PMII juga hampir sama dengan kemunculan organisasi-organisasi lain, yang mana kemunculannya dilatarbelakangi untuk menjawab dan sebagai respon dari berbagai macam persoalan kebuntuan-kebuntuan struktural, kultural dan konstitusional lembaga-lembaga politik, sosial, budaya dan hukum yang telah ada. Karna bagaimanapun persoalan-persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan oleh kelompok-kelompok yang berbekal peralatan intelektual sehingga mampu membaca dinamika dan kontradiksi-kontradiksi sosial yang terjadi.

Melalui gerakan massif yang bertarget pendek dengan melakukan perubahan-perubahan struktural, serta gerakan-gerakan pengkaderan yang berjangka dan bertarget panjang pada perubahan-perubahan yang lebih mendasar, PMII memenuhi tanggung jawab sebagai salah satu *agent of social change dan agent of social control*.

Walaupun demikian sejarah awal pembentukan PMII sebagai salah satu gerakan pengkaderan partai, tentunya juga PMII tidak bisa lepas dari bayangan masa lalu. Keputusan melepaskan diri dari struktural NU pada tahun 1972 tidak sepenuhnya terwujud. NU sebagai ruh awal munculnya organisasi ini masih menjadi *elementary enthusiasm* bagi gerakannya. Terbukti, *ahlus sunnah wal jama'ah* masih dipakai sebagai ideologi gerakan walau tetap ada perbedaan dalam penafsiran serta masih dianggap normatif.

Sehingga pada tahap selanjutnya tanpa sedikitpun menghilangkan identitas sebagai kaum tradisi NU, walaupun dalam perjalanannya melakukan pembenahan-pembenahan paradigmatis dengan melakukan refleksi-refleksi gerakan PMII yang disertai dengan pembacaan-pembacaan global kontemporer. Sehingga lahirlah beberapa paradigma seperti “Paradigma Arus balik Masyarakat Pinggiran”, “*Free Market Ideas*”, “*Paradigma Kritis Transformatif*” dan lain-lain.

Pengembangan nilai-nilai dan paradigma gerakan tersebut menjadi penting sebagai landasan gerak dan menjaga sikap kritis yang menyertainya. Dengan demikian kaderisasi menjadi sebuah

tuntutan yang tidak dapat dipisahkan sama sekali dari organisasi kaderisasi seperti PMII, dengan berbagai dasar argumentasinya.<sup>1</sup>

*Pertama*, argument idealis, dimana kaderisasi merupakan media pewarisan nilai-nilai kepada gerakan baru. Karenanya tidak cukup hanya satu atau dua hari tetapi merupakan awal dimana proses pendidikan dimulai. Kaderisasi ini kemudian berkembang sebagai sebuah tempat dimana indoktrinasi dilakukan para senior, sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi senior yang progresif dan kreatif menjabarkan nilai-nilai dan organisasi.

*Kedua*, argumentasi strategis. Kaderisasi bisa dianggap strategi bagi proses penyadaran dan pemberdayaan diri. Ditengah proses tersebut terjadi sebuah proses mobilisasi sosial yang akan berjalan baik secara horizontal dan vertical. Dengan hal tersebut kaderisasi mengandalkan adanya sistem dan sarana-sarana yang memadai dalam memfasilitasi setiap proses pemberdayaan mahasiswa hingga menjadi alumni nantinya, sejalan dengan kebutuhan dasar manusia.

*Ketiga*, argumentasi praktis. Kegunaan praktis kaderisasi ialah untuk memperbanyak jumlah anggota. Banyaknya kader akan melahirkan citra yang positif di masyarakat bahwa organisasi tersebut kuat dan populer.

*Keempat*, argument pragmatis. Kaderisasi dengan sendirinya merupakan ajang persaingan antara kelompok disaat kelompok lain juga melakukan hal yang sama, utamanya untuk merebutkan sumber daya manusia. Dengan demikian berdampak pada sebuah tanggapan bahwa pengkaderan dipersiapkan untuk membentuk kader yang siap bersaing dengan organisasi lainnya. Hingga dalam realitasnya seringkali bersifat eksklusif.

*Kelima*, argument administrative. Kaderisasi ini dipandang sebagai proses rutinitas organisasi yang merupakan mandat organisasi kaderisasi.

Berbagai argument diatas menjadi pijakan dasar dalam kaderisasi dan berpengaruh secara langsung dengan gerakan-gerakan PMII pada umumnya. Isu-isu serta pembacaan-pembacaan kritis sangat berpengaruh, sehingga gerakan sosial politik yang dibangun oleh PMII senantiasa dinamis dan berubah-ubah sesuai dengan kondisinya.

## **B. Gambaran Khusus PMII Cabang Kota Semarang**

### **1. Sejarah dan Peran PMII**

Arah serta bentuk perjuangan senantiasa berdasar pada arus historis. Demikian halnya dengan PMII sebagai salah satu gerakan sosial masyarakat berawal dari akar kesejarahan yang didasarkan pada kondisi sosial politik tertentu. Atas dasar arah dan bentuk perjuangan dan pergerakan yang telah ditentukan tersebut, serta merta berkembang menjadi gerakan yang tidak

---

<sup>1</sup> Eman Hermawan, *Menjadi Kader Pergerakan: Dari Simpatisan Menjadi Kader Militan, Dari Individu Menjadi Organizer*, (Yogyakarta: KLINIK,2000), hlm. 9-16.

dapat dikatakan kecil. Walaupun pada awal kemunculannya hanya berupa keresahan dan kegelisahan yang timbul diantara mahasiswa *Nahdliyyin*.

Ide untuk membuat organisasi mahasiswa *Nahdliyyin* didasari atas tiga aspek. 1) Wadah Departemen Perguruan IPNU dianggap tidak lagi cukup kuat untuk mewadahi gerakan mahasiswa. 2) Pertimbangan politik dan keamanan dalam negeri menuntut pengamanan yang ekstra hati-hati, khususnya bagi kalangan mahasiswa Islam. 3) satu-satunya wadah yang menaungi mahasiswa Islam saat itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dinilai memiliki kedekatan yang sangat intim dengan partai Masyumi, sedangkan partai Masyumi secara terang-terangan melibatkan diri dalam pemberontakan PRRI.<sup>2</sup>

Keresahan dan kegelisahan-kegelisahan yang dirasakan kader NU saat itulah yang akhirnya membuat konferensi besar IPNU pada tanggal 14-14 Maret 1980 di Kaliurang Yogyakarta, dengan diawali Ismail Makky yang saat itu menjabat sebagai ketua Departemen Perguruan Tinggi dan tokoh Moh. Hartono sebagai mantan ketua pimpinan usaha Harian Pelita Jakarta, menyatakan perlunya diadakan suatu organisasi mahasiswa secara khusus bagi mahasiswa *Nahdliyyin*.<sup>3</sup>

Untuk itu dibentuk panitia 13 yang merupakan sponsor pendiri organisasi ini. Mereka terdiri dari A. Chalid Mawardi (Jakarta), M. Said Budairi (Jakarta), M. Sobich Ubaid (Jakarta), M. Ma'mun Sjukri BA (Bandung), Hilman (Bandung), H. Ismail Makky (Yogyakarta), Munsif Nachrowi (Yogyakarta), Nuril Huda Suaidi BA (Surakarta), Laili Mansjur (Surakarta), Abdul Wahab Djaelani (Semarang), Hizbullah Huda (Surabaya), M. Cholid Narbuko (Malang) dan Ahmad Husein (Makasar).<sup>4</sup>

Panitia tersebut mempersiapkan segala sesuatunya termasuk meminta nasihat dari ketua umum Partai NU KH. Dr. Idham Chalid. Beliau memberikan petunjuk dan arahan-arahan yang merupakan landasan pokok untuk bermusyawarah serta berharap agar organisasi tersebut benar-benar diwujudkan untuk kader NU.<sup>5</sup>

Singkatnya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) beserta kelengkapan organisasinya lahir dalam musyawarah mahasiswa Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tanggal 17 April 1960 di Balai Pemuda Surabaya. H. Mahbub Junaidi terpilih menjadi ketua umum pertama dan mengemban tugas untuk mengembangkan organisasi ini.

Nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sendiri dipilih karena memiliki dasar-dasar filosofisgerakan. Makna pergerakan berarti dinamika dari hamba yang senantiasa bergerak

---

<sup>2</sup> Fauzan Alfas, *PMII Dalam Simpul-simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2004) hlm.4.

<sup>3</sup> Fauzan, *PMII dalam ...*, hlm. 5.

<sup>4</sup> Chatibul Umam, *Sekitar Kelahiran PMII*, dalam Muhammad Fajrul Falah (penyunting), *Citra Diri PMII*, (Yogyakarta: Yayasan Patria Nusantara, 1988), hlm. 3.

<sup>5</sup> Umam, *Sekitar kelahiran ...*, Hlm. 3.

menuju tujuan idealnya memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. Mahasiswa mencerminkan kelompok yang terbangun dari citra diri sebagai insan religius, akademik, insan sosial dan insan mandiri. Islam berarti nilai-nilai kebenaran yang berlandaskan *ahlus sunnah wal jama'ah* yang secara profesional dalam pemahaman antara *Iman, Islam* dan *Ihsan*. Sedangkan Indonesia berarti masyarakat bangsa dan Negara dalam kesatuan territorial dan falsafah ideology bangsa (pancasila) serta UUD 1945.<sup>6</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya sampai sekarang, PMII mengalami tiga masa yang berbeda: masa *underbow* NU, masa independensi dan masa interdependensi.

*Pertama*, masa *underbow* NU ialah pada masa awal antara tahun 1960-1971. PMII secara langsung berada di bawah struktur NU bahkan pengkaderan yang dilakukan oleh PMII diarahkan untuk mempersiapkan kader-kader NU. Maka tidak heran ketika orientasi utama pada masa awal adalah merupakan tangan panjang partai di dalam kampus. Hal yang sama juga dilakukan organisasi ekstra kampus yang lain. Penegasan berpolitik praktis ini pula disampaikan Mahbub Junaidi dalam pidato ketua umum PP PMII dalam Panca Warsa PMII, pada tanggal 17 april 1965, sebagai mana yang telah dikutip oleh Fauzan Alfas.

Mereka bilang mahasiswa yang baik adalah mahasiswa non partai, bahkan non politis, yang berdiri di atas semua golongan, tidak ke sana, tidak ke sini, seperti seorang mandor yang tidak berpihak. Sebaliknya, kita beranggapan, justru mahasiswa itulah yang harus berpartisipasi secara kongkrit dengan kegiatan-kegiatan partai politik.<sup>7</sup>

Peran sebagai tangan panjang partai tidak serta merta menutup peran lain dalam lingkup yang jauh lebih luas. Keterlibatannya juga dilakukan dalam gerakan-gerakan mahasiswa mulai dari sebagai anggota PORPISI (Persatuan Organisasi Pemuda Islam Indonesia), Front Nasional, Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PPMI), bahkan WAY (*World Assembly of Youth*), sampai membentuk yayasan Kesejahteraan Mahasiswa Indonesia (YAKMINDO), serta mengeluarkan sikap atas berbagai kebijakan pemerintah saat itu.<sup>8</sup> Termasuk melakukan gerakan-gerakan jalanan, melalui Gerakan Muda Islam (GEMUIS), menolak pembubaran HMI oleh presiden Soekarno atas desakan CGMI.<sup>9</sup> Kemudian lewat Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), PMII yang diwakili oleh M. Zamroni yang sekaligus sebagai ketua Presidium Pusat KAMI bersama elemen lain yang melakukan tuntutan atas tindakan pemerintah ORLA yang

---

<sup>6</sup> Fauzan, *PMII dalam ...*, hlm. 10-11.

<sup>7</sup> Fauzan, *PMII dalam ...*, hlm. 8.

<sup>8</sup> Fauzan, *PMII dalam ...*, hlm. 13.

<sup>9</sup> Fauzan, *PMII dalam ...*, hlm. 42-43.

melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta penyimpangan dari cita-cita perjuangan kemerdekaan.<sup>10</sup>

*Kedua*, masa independensi (1972-1990). Keputusan untuk lebih independen dan tidak terikat kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila, ini dimunculkan pada Mubes ke III yang diselenggarakan di Munarjati, Malang Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1972, dan dikukuhkan pada kongres V tahun 1973 di Ciloto Jawa Barat dalam Manifes Independen.

Salah satu alasan yang mendasar PMII mengambil keputusan dan langkah tegas untuk independen dari NU adalah perkembangan politik yang tidak kondusif, dimana ketika Golkar meraih kemenangan, sikap pemerintah terhadap masyarakat dan ormas-ormas represif.<sup>11</sup> Termasuk berupaya mengurangi peranan partai-partai politik, salah satunya dengan memfusikan partai NU dalam PPP. Sementara represi pemerintah juga dimunculkan dengan komando “*back to campus*”.<sup>12</sup>

Hal inilah yang menyebabkan gerakan PMII mengalami kemandulan. Terlebih tatkala semua energy terkuras hanya untuk mengurus masalah partai, sementara kepedulian terhadap kiprah sosio-kulturalnya nyaris terabaikan.

Karena pilihan independensi tidak dapat lagi ditolak atas dasar, *pertama*, dimaksudkan dalam rangka mendinamisir dan mengembangkan potensi cultural yang bersumber pada penghayatan nilai ajaran Islam. *Kedua*, merupakan pengembangan sikap kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab sebagai dinamika. Pergerakan dilakukan dengan bermodal dan bersifat kemahasiswaan, serta didorong oleh moralitas untuk memperjuangkan pergerakan dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan pancasila. *Ketiga*, dengan independensinya tersedia kemungkinan alternative yang lebih lengkap bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berdasarkan Islam *ahlus sunnah wal jama'ah*.<sup>13</sup>

Independensi PMII ini disertai dengan gerakannya untuk mengkoordinasikan gerakan dan aktifitas organisasi mahasiswa dalam kelompok Cipayung. (PMII, PMKRI, HMI, GMNI, GMKI). Hal ini merupakan langkah arif untuk menjadi kekuatan politik tersendiri yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat atas.<sup>14</sup> Walaupun pada saat itu telah ada organisasi kepemudaan KNPI, namun keberadaannya lebih menampakkan alat politik korporasi pemerintah ORBA.

---

<sup>10</sup> Nusron Wahid, *Membongkar Hegemoni NU: Dibalik Independensi PMII* (1966-1972), (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2000), hlm. 58.

<sup>11</sup> Wahid, *Membongkar Hegemoni ...*, hlm. 140.

<sup>12</sup> Humaidy Abdussami, “*Melacak Khittah PMII*”, dalam Muhammad Fajrul Falaakh, *hlm. 18*.

<sup>13</sup> Cholidy Ibhar, “*Mendayung di Atas Daur Rutinisme*”, hlm. 23-24.

<sup>14</sup> Fokuss, “*PMII, Generasi Muda dan Asas Tunggal*”, hlm. 29.

*Ketiga*, periode interdependensi tahun 1990 sampai sekarang. PMII secara struktural memang telah lepas dari NU namun secara cultural ternyata tidak dapat lepas sama sekali. Melalui kesamaan pemahaman Islam *Ahlu sunnah wal Jama'ah*, yang tercermin dalam kesamaan persepsi keagamaan dan perjuangan, visi social dan kemasyarakatan, serta ikatan historis, maka secara kultur PMII dan NU tidak dapat dilepaskan sama sekali. Belum tuntasnya independensi PMII di satu pihak dan tela'ah *khittahnya* NU sebagai jam'iyah keagamaan di lain pihak mengharuskan melakukan penegasan terhadap pola hubungan dengan NU. Maka melalui deklarasi dalam kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, PMII menegaskan hubungannya dengan NU dan saling ketergantungan (*Interdependensi*).<sup>15</sup>

Implementasi interdependensi ini diwujudkan dalam beberapa bidang. *Pertama*, pemikiran. Kerjasama di bidang ini dirancang untuk pengembangan pemikiran keislaman dan kemasyarakatan. *Kedua*, sumber daya manusia. Kerjasama dibidang ini ditekankan pada pemanfaatan secara maksimal manusia-manusia PMII dan NU. *Ketiga*, pelatihan. Kerjasama di bidang ini dirancang untuk pengembangan sumber daya manusia baik PMII dan NU. *Keempat*, rintisan program. Kerjasama di bidang ini berbentuk pengelolaan suatu program secara bersama seperti program pengembangan ekonomi, program aksi social dan lain-lain.<sup>16</sup>

Biarpun demikian, status interdependensi tidak jauh berpengaruh dalam gerakan PMII yang senantiasa berdiri sebagai gerakan moral. Realitas yang senantiasa berubah telah meniscayakan penyikapan-penyikapan kritis agar tetap menjadi bagian dari gerakan tersebut. Gemuruh gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dianggap sebagai moment kebangkitan gerakan mahasiswa yang telah lama tidur. Buruknya pemerintahan yang dipimpin Soeharto ditambah dengan krisis multidimensi yang melanda bangsa menambah semangat gerakan. Hingga akhirnya gerakan 1998 menjadi salah satu momentum bersejarah karena telah mengantarkan bangsa Indonesia dari orde baru kepada orde reformasi.

Beralihnya orde baru ke orde reformasi bukan berarti telah berlalunya "kematian" Indonesia, masa awal orde reformasi telah menjadikan masyarakat mengalami *euphoria* hingga menimbulkan keadaan *chaos* di berbagai tempat. Primordialisme, pragmatisme, egoisme muncul sebagai efek negatif atas orde reformasi yang menjanjikan otonomi dan kebebasan individu.

Hal inilah yang memberikan stimulus bagi gerakan mahasiswa di masing-masing daerah. Di Semarang sendiri, konsentrasi gerakan PMII membutuhkan energy ekstra untuk ikut menyelamatkan "persalinan bayi demokrasi". Terlebih lagi, Gus Dur yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh pro demokrasi yang senantiasa berjuang bersama elemen pro demokrasi lainnya

---

<sup>15</sup>Fauzan ,*PMII dalam ...*, hlm. 146

<sup>16</sup>Fauzan ,*PMII dalam ...*, hlm. 148

(termasuk PMII) di jalur kultural, justru menjadi presiden yang berjuang di jalur struktural. Hal ini menimbulkan kecanggungan tersendiri bagi kalangan pro demokrasi untuk memposisikan diri dalam relasinya *social versus state*.

Namun demikian ruh PMII yang merupakan organisasi kader menuntut sikap tegas untuk berada di jalur kerakyatan. Melalui paradigma kritis transformatifnya yang dimunculkan di era reformasi ini, kader-kader bangsa didoktrin dengan visi kerakyatan hingga tujuan lebih besarnya diarahkan untuk membentuk tanggungjawab sosial yang melekat dalam gerakan mahasiswa, serta dimanifestasikan dalam dua wilayah kerja. *Pertama*, PMII dituntut untuk memberikan control moral politik kepada penyelenggara Negara. *Kedua*, PMII harus pula diarahkan pada tugas mendampingi rakyat ber "*sparing partner*" dengan Negara.

## **2. Struktur Kelembagaan**

Sebagai salah satu cabang dari PMII, PMII Cabang Kota Semarang tidak dapat melepaskan diri secara penuh dari peraturan-peraturan dasar yang telah ditetapkan. Ia berkewajiban menjalankan AD/ART, keputusan kongres, serta peraturan organisasi. Termasuk peraturan eksistensi cabang yang mensyaratkan paling tidak memiliki dua komisariat.

PMII cabang Kota Semarang dalam struktur organisasi berada di bawah PB (Pengurus Besar) PMII dan PKC (Pengurus Koordinator Cabang PMII Jawa Tengah, serta membawahi beberapa komisariat dan rayon, sampai pada pertengahan tahun 2012, PMII cabang Kota Semarang memiliki beberapa komisariat dan rayon yang tersebar di delapan kampus yaitu IAIN Walisongo (Komisariat Walisongo), Universitas Sultan Agung (komisariat Sultan Agung), Universitas Wahid Hasyim (komisariat Wahid Hasyim), IKIP PGRI (komisariat PGRI), Universitas Diponegoro (Komisariat Diponegoro), Universitas Negeri Semarang (Komisariat Al Ghozali), Politeknik Semarang (Komisariat Galang Sewu), Universitas 17 Agustus (Komisariat Untag).

Masing-masing komisariat dan rayon tersebut secara kelembagaan berada di bawah cabang. Namun pada fungsinya, cabang tidak secara penuh mengintervensi komisariat atau rayon, tetapi lebih sekedar sebagai fasilitator dan mediator Rayon atau Komisariat.

Sedangkan dalam struktur kelembagaan PMII Cabang Kota Semarang selalu mengalami perubahan pada saat konferensi cabang. Hal ini didasari atas kebutuhan hasil pembacaan internal dan eksternal yang komprehensif. Dan dari sisi aturan legal organisasi, hal ini tidak menjadi masalah karena berkaitan dengan pengembangan organisasi baik lokal maupun regional sepanjang tidak menyalahi AD/ART. Alasan perubahan ini juga didasarkan pada efektifitas serta akomodatif.

Biarpun demikian tidak semua mengalami perubahan. Paling tidak ada beberapa hal yang konsisten dalam struktur kelembagaan, yaitu Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, serta beberapa bidang garapan yang meliputi bidang pendidikan dan pengaderan (Departemen Pendidikan dan

Pengaderan), bidang kajian, bidang penerbitan, bidang sosial politik (Departemen Sosial dan Politik), bidang pemberdayaan dan advokasi perempuan (Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan/ LPSAP), serta advokasi masyarakat (Lembaga Advokasi Masyarakat/ LAMAS).

Beberapa bidang yang dianggap khusus diposisikan istimewa di lembaga semi-otonom cabang. Lembaga ini diberi kebebasan mengelola program dan pengembangan lembaga tetapi tetap berada di bawah struktur serta koordinasi cabang. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan (LPSAP) –lembaga ini merupakan wadah pengganti KOPRI– serta Lembaga Advokasi Masyarakat (LAMAS).

Dari beberapa bidang garapan PMII tersebut, masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan sendiri.

- a. Bidang pendidikan dan pengkaderan masuk dalam Departemen Pendidikan dan Pengkaderan. Departemen ini bertugas untuk merumuskan konsep pendidikan dan pengkaderan di tingkat cabang, komisariat dan rayon serta melaksanakan pelatihan dalam rangka mempersiapkan proses pengkaderan.
- b. Bidang sosial politik masuk dalam Departemen Sosial dan Politik (Depsospol). Departemen ini bertugas melakukan pembahasan secara mendalam terhadap isu-isu sosial politik, serta mengambil kebijakan taktis strategis berkaitan dengan bidang sosial politik.
- c. Bidang kajian dan penerbitan ini tidak selalu berada dalam satu departemen. Namun fungsi dan tugasnya tidak jauh berbeda jika dipisah atau dijadikan satu. Bidang kajian bertugas melaksanakan program yang berkaitan dengan kajian dan pemberdayaan kader dalam bidang intelektual. Sedangkan penerbitan berkaitan dengan program yang berkaitan dengan penerbitan.
- d. Bidang advokasi dan pemberdayaan perempuan diamanatkan ke Lembaga Pengembangan Studi dan Advokasi Perempuan (LPSAP). Bidang ini menggarap program yang berkaitan dengan pengembangan studi dan advokasi khususnya dalam koridor perempuan sebagai obyek kajian, serta menjalin kerja sama dengan pihak/organisasi yang konsen terhadap isu-isu keperempuanan.
- e. Bidang advokasi masyarakat berada di bawah tanggungjawab Lembaga Advokasi Masyarakat (LAMAS). Lembaga ini bertugas untuk melaksanakan program berupa kontribusi baik pemikiran, moral maupun advokasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan keadvokasian, khususnya terhadap kaum-kaum tertindas.

Walaupun dalam berbagai bidang tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda, tetapi dalam realitasnya tetap berada dalam satu fungsi yakni memfasilitasi dan melakukan pengkaderan baik di tingkat cabang, komisariat dan rayon. Serta secara umum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan dan eksistensi organisasi di tingkat Kabupaten/ Kota.



Bahkan untuk menampung keinginan kader dan anggota, lembaga-lembaga seperti lembaga seni budaya cabang pernah muncul dengan programnya untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan yang berbasis kerakyatan. Hasilnya, kerjasama dengan anak-anak jalanan (non formal) melahirkan kelompok musik Trotoary Semarang. Walaupun pada tahun berikutnya lembaga ini tidak lagi muncul, bahkan trotoary sendiri bubar. Namun kedekatan dengan anak-anak jalanan dan kaum miskin kota tetap terjaga, bahkan beberapa kader PMII tetap membaur dalam komunitas mereka.

Pengambilan kebijakan dengan memunculkan sebuah lembaga semi-otonom ataupun justru membubarkannya diambil di konferensi cabang (Konfercab) yang merupakan keputusan tertinggi di wilayah cabang. Refleksi serta berbagai pembacaan baik internal –yang menyangkut efektifitas kerja departemen tersebut– maupun eksternal –yang merupakan hasil pembacaan situasi eksternal dan kebutuhan kader– seringkali menjadi pertimbangan sendiri untuk mengambil keputusan tersebut.

Biarpun keputusan dalam Konfercab merupakan keputusan tertinggi namun refleksi serta agenda-agenda pembahasan dalam konferensi cabang tersebut didahului oleh penggodokan materi Konfercab oleh tim SC (*Steering Committee*). Beberapa hal yang biasanya menjadi bagian pembahasan adalah menyangkut Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK), Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) serta pokok-pokok pikiran dan rekomendasi, yang pembahasannya dibagi dalam komisi-komisi. Serta ditambah dengan materi-materi lain yang berkaitan dengan teknis jalannya Konfercab, mulai dari tata tertib konferensi sampai mekanisme pemilihan ketua cabang.

Keputusan dalam Konfercab tersebut hanya menyangkut persoalan-persoalan besar organisasi, sementara penjabaran kinerja serta langkah-langkah pengurus direncanakan dalam rapat kerja pengurus, yang didahului dengan pembekalan melalui pembacaan internal dan eksternal organisasi. Sementara beberapa keputusan dalam rapat kerja tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana idealitasnya seiring dengan tidak optimalnya kinerja beberapa pengurus.

Tidak optimalnya kinerja pengurus merupakan masalah klasik yang dihadapi organisasi kader semacam PMII, terlebih kader-kadernya masih menyangand status sebagai mahasiswa yang dituntut studinya. Belum masalah orientasi organisasi yang memang bukan merupakan organisasi profit yang menjanjikan kesejahteraan bagi pengurus ataupun kadernya.

### **3. Rekrutmen dan Keanggotaan**

Penerimaan menjadi anggota PMII dimulai dari tingkat rayon yang notabene merupakan struktur organisasi yang paling bawah dan bersentuhan langsung dengan kader. Rayon secara langsung bertanggungjawab terhadap rekrutmen massa serta pelaksanaan pengaderan awal PMII.

Secara normatif, dalam Anggaran Rumah Tangga PMII bab III bagian II pasal 4 disebutkan bahwa penerimaan anggota didahului dengan mengajukan permintaan secara tertulis

atau mengisi formulir untuk menjadi calon anggota PMII kepada Pengurus Cabang. Dan telah sah menjadi anggota PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) dan mengucapkan baiat persetujuan dalam suatu upacara pelantikan yang diadakan oleh Pengurus cabang.<sup>17</sup>

Rekrutmen anggota PMII di beberapa perguruan tinggi diadakan setiap tahun dan ditangani oleh pengurus rayon atau komisariat. Di beberapa perguruan tinggi, MAPABA secara langsung ditangani oleh rayon. Namun tak jarang pula secara kolektif dilakukan di komisariat. Bahkan ada pula yang karena ketidakmampuannya, ditangani secara penuh oleh cabang.

Di komisariat Walisongo, misalkan, MAPABA ditangani dan diselenggarakan secara langsung oleh rayon. Hal ini dikarenakan rekrutmen yang dilakukan di masing-masing rayon berhasil menjaring peserta minimal 50% dari mahasiswa yang diterima di fakultas masing-masing. Bahkan saking banyaknya anggota yang hendak mendaftar, MAPABA seringkali dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

Sementara di perguruan tinggi di luar IAIN, rekrutmen anggota tidak sebesar IAIN. Sehingga pelaksanaan MAPABA jarang dilakukan di tingkat rayon, namun secara kolektif dilakukan di tingkat komisariat atau gabungan rayon. Bahkan, karena sedikitnya peminat, ada yang “dititipkan” di MAPABA tempat lain.

Sementara untuk memperlebar sayap organisasi di perguruan tinggi yang lain, jalur kultural dianggap efektif. Praktisnya dilakukan dengan dua cara, yakni membangun kontak person dengan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut serta mengundang mereka dalam kegiatan-kegiatan PMII. Hal ini dapat mengembangkan *ghirah* untuk membentuk komisariat baru.

Anggota yang telah resmi masuk ke PMII praktis terikat dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh PMII. Terlebih PMII sendiri merupakan organisasi ideologi yang memegang teguh prinsip-prinsip teologis dan ideologi yang menjadi pegangannya. Dan jika secara prinsipil anggota tersebut melanggar AD/ART serta ketentuan-ketentuan dalam PMII, maka dia dapat dipecat keanggotaannya.

#### **a. Jenjang dan Materi Kaderisasi**

Kaderisasi merupakan proses wajib bagi terbentuknya gerakan moral massif. Karenanya dalam proses pengaderan disertai dengan pembacaan situasi dan kondisi global, nasional serta lokal. Refleksi atas realitas sosial kontemporer ini akan menjadi rujukan untuk menentukan arah dan strategi pengaderan.<sup>18</sup>

Dalam pengaderan PMII dikenal tiga bentuk pengaderan. *Pertama*, pengaderan formal. Yakni jenjang pengaderan yang telah ditentukan AD/ART. Pengaderan ini berjenjang mulai

---

<sup>17</sup>AD/ ART PMII ..., hlm 72.

<sup>18</sup>AD/ ART PMII ..., hlm 72.

MAPABA (Masa Penerimaan Mahasiswa Baru), PKD (Pelatihan kader Dasar) dan PKL (Pelatihan Kader Lanjut).

*Kedua*, pengaderan informal. Yakni kaderisasi yang dilakukan bersamaan dengan proses-proses berorganisasi. Pada dasarnya, inti kaderisasi dan pendidikan terletak dalam konteks ini. Internalisasi nilai dan ideologi serta kematangan dalam hal manajerial dan teknikalitas terbentuk dalam proses ini. Proses ini memungkinkan kader belajar langsung dari lapangan dan menjawab kebutuhan-kebutuhan objektif lapangan.<sup>19</sup>

*Ketiga*, pengaderan non-formal. Jenis pengaderan ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kader, seperti pengembangan *skill* dan lain-lain. Pengaderan ini berangkat dari pemetaan bakat dan minat kader untuk terjun dalam bidang-bidang tertentu.<sup>20</sup>

Idealnya, jenis-jenis pengaderan tersebut berjaln berkelanjutan. Dengan harapan kader yang nantinya terbentuk mempunyai skill memadai serta militan dalam gerakan. Kaderisasi formal menjadi penting dan utama karena merupakan dasar bagi kader PMII. Dan seterusnya pengaderan informal dan non-formal akan ditentukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kader.

Hubungan antara pengaderan formal, informal serta non-formal dalam kaderisasi PMII dapat digambarkan dalam skema metodologi kaderisasi sebagai berikut:<sup>21</sup>



→ Pengaderan informal menjadi langkah pertama dalam merekrut kader. Pemanfaatan momen-momen kemahasiswaan seperti orientasi kampus, penerimaan mahasiswa baru efektif untuk mendekat pada mahasiswa baru dan kemudian secara pelan-pelan diajak masuk dalam gerakan.

Tahap pengaderan formal (MAPABA) menjadi tahap selanjutnya setelah mahasiswa yang telah didekati tersebut merasa dekat dan tertarik dengan PMII. Selanjutnya setelah benar-benar menjadi anggota PMII, kader tersebut diikat secara kultur agar tidak menjadi kader mengambang dengan menggunakan kaderisasi informal ataupun disertakan dalam pengaderan non-formal sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Dan setelah itu mengikuti pengaderan formal tahap lebih lanjut.

Dengan demikian dalam tahapan-tahapan pengaderan formal, ada waktu jeda yang dimanfaatkan untuk tetap mengikat kader sekaligus memberikan materi-materi yang dapat menunjang pergerakan. Materi-materi tersebut merupakan perkembangan dan kebutuhan kader

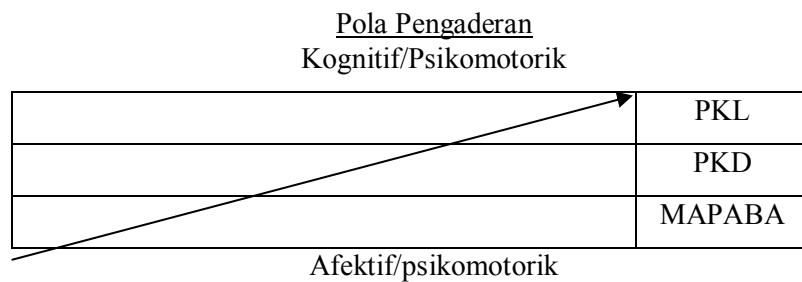
<sup>19</sup>Mustafied, *et. al.*, *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Jakarta: PB PMII, 2001), hlm. 112.

<sup>20</sup>Afif Sholahudin, *et. al.*, *Membangun Sentrum Gerakan di Era Neo Liberalisme*, (Jakarta: PB-PMII, tt.), *op.cit.*, hlm 107.

<sup>21</sup>Mustafied, *Pendidikan Kritis Transformatif*, hlm. 107.

dalam menjawab problem dan kebutuhan kemasyarakatan. Materi-materi tersebut dapat berupa pematangan materi formal atau juga merupakan pengembangan skill dan pengetahuan sesuai bakat dan minat seperti advokasi, pers, analisis sosial dan lain sebagainya.

Materi dalam pengaderan formal meliputi beberapa materi pokok yang meliputi wacana keislaman, aswaja, NDP PMII, visi/ misi, tertib administrasi, analisis sosial dan beberapa materi lain yang masing-masing mempunyai tahapan tingkatan di masing-masing jenjang pengaderan. Pada tahapan awal kader didoktrin dengan nilai-nilai dasar yang menjadi dasar kebenaran dalam bersikap dan bertindak. Dan pada tahapan yang lebih tinggi lagi, doktrin tak lagi banyak dijejalkan tetapi yang lebih banyak adalah proses berfikir, dialog dan refleksi. (lihat pola pengaderan)



Dengan penerapan pola pengaderan yang demikian ini, maka kader yang dihasilkan akan menjadi kader yang memiliki visi dan ideologi yang kuat, memiliki kapasitas intelektual dan analisis sosial kuat, memiliki integritas moral yang tinggi, serta memiliki skill organisatoris memadahi atau teknikalitas yang handal.

### 1. Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA)

MAPABA dalam tertib administrasi merupakan persyaratan untuk menjadi anggota PMII, pengurus rayon. Yang diharapkan dari MAPABA ialah menghasilkan kualitas kader basis, profesional dan kader administrator. Karena merupakan pengaderan awal, PMII memainkan peran persuasi dengan memasuki wilayah mereka dan dikeluarkan dari pintu kita.<sup>22</sup>

Harapan dari pengaderan dalam MAPABA adalah munculnya kader basis yakni kader simpatisan serta kader umum yang melibatkan diri sebagai penggembira dan orang bebas, menghadiri kegiatan-kegiatan organisasi, dilibatkan dalam kepanitiaan teknis serta mengikuti kader formal selanjutnya.

Sedangkan materi yang disampaikan dalam MAPABA meliputi beberapa jenis wilayah yang disentuh yakni *pertama*, wilayah ideologi dan visi yang meliputi materi Aswaja for beginner, NDP PMII dan citra *ulul albab* serta visi misi PMII dan struktur kelembagaan. *Kedua*, metode berfikir yang meliputi materi berupa pengantar ansos, filsafat dan idiologi

<sup>22</sup>Lihat Mustafied, *Pendidikan Kritis Transformatif, op. cit.*, hlm. 108.

pendidikan, pengantar jurnalisme, pengantar *civil society* serta kapitalisme *for beginner*. *Ketiga*, sejarah yang meliputi sejarah gerakan mahasiswa dan PMII nasional. *Keempat*, skill organisasi yang meliputi keorganisasian, manajemen organisasi non-profit serta metode pengorganisasian kampus.<sup>23</sup>

Materi-materi tersebut tidak semua dimasukkan dalam pengaderan, karena ada beberapa materi lokal yang dirasa lebih penting dan menyentuh kader di masing-masing wilayah. Pada kepengurusan PMII periode 2010-2012 sendiri merumuskan materi wajib dari MAPABA meliputi Aswaja, NDP-PMII, Islam Rahmatan lil ‘alamin, visi misi dan tertib administrasi, gender, mahasiswa dan tanggungjawab sosial, serta sejarah gerakan mahasiswa dan PMII. Sedangkan materi tambahannya berupa antropologi kampus; teknik diskusi, persidangan dan lain-lain; manajemen organisasi; serta materi-materi lain sesuai kebutuhan rayon/komisariat.<sup>24</sup>

## 2. Pelatihan Kader Dasar (PKD)

Pelatihan Kader Dasar merupakan jenjang pengaderan formal setelah MAPABA. PKD biasanya diikuti sebagai syarat menjadi ketua komisariat. Kader yang dimunculkan dari PKD diharapkan merupakan intelektual organis dengan kapasitas visi dan teknikalitas yang dapat diandalkan. Kualifikasi minimal dari kader ini adalah dapat melakukan hal-hal yang dapat dilakukan kader umum, menyumbang waktu dan tenaga dalam kepanitiaan, mampu mengidentifikasi bakat dan minat khusus dalam berorganisasi, mendapatkan tugas-tugas khusus dalam organisasi serta memiliki keandalan dalam memimpin organisasi atau keandalan dalam bidang tertentu.

Karena kader PKD dipersiapkan untuk menjadi organizer dan memiliki kualifikasi kasus, maka materi yang disampaikan dalam PKD sedikit lebih berat dari MAPABA. Materi-materi tersebut tetap meliputi wilayah-wilayah kerangka analisis/ metode berfikir dan teori-teori sosial yang meliputi *Aswaja for intermediete* dan paradigma kritis transformatif. Di wilayah metode berfikir, materi yang disampaikan meliputi materi yang berkaitan dengan kapitalisme, politik hukum di Indonesia, format ekonomi Indonesia, format politik Indonesia, *civil society*, dan analisis gender.

Sedangkan dalam wilayah sejarah membahas mengenai sejarah gerakan Islam dan gerakan Islam di Indonesia serta sejarah gerakan mahasiswa lokal. Sementara dalam wilayah skill organisasi, materi yang disampaikan meliputi analisis SWOT, *leadership*, manajemen aksi, serta manajemen pengorganisasian antar kampus.

---

<sup>23</sup>Mustafid, *Pendidikan Kritis ...*, hlm. 109.

<sup>24</sup>*Petunjuk Pelaksanaan Kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia*, (PC PMII Kota Semarang, tt.), hlm. 4.

Tidak berbeda dengan MAPABA, materi yang disampaikan dalam PKD juga tidak mutlak ditelan. Hanya beberapa persoalan penting dan menyangkut pembahasan “pertarungan” gerakan dalam wilayah yang lebih luas saja yang dibahas. Pada kepengurusan PMII cabang Kota Semarang periode 2001-2002 merumuskan materi wajib PKD berupa ASWAJA II, Paradigma Kritis Transformatif, Islam dan Pembebasan kaum *mustadh'afin*, kapitalisme/developmentalisme, analisa sosial, gender II, *opinion building* serta analisis SWOT.<sup>25</sup> Materi tersebut merupakan usaha membuka cakrawala mengenai *world system* yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap persoalan bangsa dan negara.

### 3. Pelatihan Kader Lanjut (PKL)

Pelatihan kader Lanjut diarahkan untuk membentuk *social organizer* atau *community organizer* yang seharusnya menjadi syarat bagi ketua cabang. Pembekalan yang dilakukan di PKL ini menyangkut persoalan visi, teori-teori sosial, perangkat analisis, dan skill organisatoris. Dalam PKL ini diharapkan tercipta kader yang memenuhi kualifikasi kamil yang bercirikan melampaui pengalaman organisasi formal, mampu menjadi juru bicara bagi komunitas lain, mampu memimpin secara pro-aktif terhadap perubahan-perubahan strategis, serta memiliki kemampuan leadership kuat, manajerial, atau kapasitas intelektual tinggi.<sup>26</sup>

Di tingkat PKL, materi yang disampaikan dapat dikatakan merupakan materi berat. Wilayah yang dimasuki tidak berbeda dengan MAPABA dan PKD namun terdapat beberapa pengembangan wacana dan skill. Di wilayah ideologi dan visi, materi yang disampaikan menyangkut *Aswaja for advance* atau yang biasa disebut kritik wacana agama, Islam progresif-transformatif dan strategi taktik gerakan PMII. Di wilayah pemikiran menyangkut persoalan antropologi masyarakat Indonesia, sosiologi masyarakat Indonesia, kapitalisme, kritik teori pembangunan, teori negara, serta gerakan sosial kontemporer.

Sedangkan di wilayah sejarah, pembahasannya meliputi sejarah masyarakat. Sementara di wilayah skill organisasi menyangkut materi pengantar advokasi, pengorganisasian masyarakat serta *strategic planing*.

Jenjang PKL merupakan jenjang pengaderan tertinggi. Karena itu beberapa cabang seringkali “takut-takut” untuk mengadakannya. Bahkan karena itu pula PKL terkadang diadakan secara langsung oleh PB-PMII.

Beberapa bentuk pengaderan formal tersebut telah sedemikian rupa berjalan dan diarahkan guna melahirkan kader-kader yang diidealkan, sesuai dengan jenjangnya. Akan tetapi materi yang termaktub tersebut secara keseluruhan bukan sesuatu yang mesti ditelan mentah-mentah. Latar belakang serta disiplin ilmu kader disamping intensitas dan tingkat

---

<sup>25</sup>Petunjuk Pelaksanaan ..., hlm. 5.

<sup>26</sup>Mustafied, *Pendidikan Kritis* ....., hlm. 112.

pengaderan non-formal dan informal merupakan pertimbangan tersendiri dalam menentukan materi. Bahkan pengaderan informal dan non-formal yang tren dilakukan akhir-akhir ini justru lebih banyak melahirkan kader-kader yang intens menekuni bakat dan minat yang melatarbelakanginya. Hal ini dikarenakan *follow up* (bentuk pengaderan informal) justru lebih ditekankan pasca pelatihan.

Beberapa bentuk pengaderan nonformal yang kerap dilakukan meliputi bidang-bidang advokasi, investigasi, sekolah pemikiran dan lain-lain. Bentuk-bentuk pelatihan yang kerap dilakukan seperti Pelatihan Advokasi Dasar, Pelatihan Advokasi Perempuan, pelatihan investigasi, sekolah filsafat, analisis sosial, dan lain sebagainya.

Disamping melaksanakan pengaderan non-formal yang memenuhi kebutuhan bakat dan minat kader, hasil pelatihan tersebut biasanya dimanifestasikan dalam pelaksanaan program-program. Bahkan tidak jarang disertai dengan kerjasama dengan organ lain yang memiliki tujuan sama.

### **C. Aktualisasi PMII Kota Semarang dan Gerakan Kaderisasi**

#### **1. Analisis Rekrutmen dan Keanggotaan Kaderisasi Formal PMII Cabang Kota Semarang 2010-2012**

Kaderisasi memang bukan sebagai disiplin ilmu tertentu dalam organisasi, namun kaderisasi menjadi sangat penting dalam langkah organisasi yang bergerak dan fokus dalam gerakan yang berbasis kader. Adanya pengakuan dari masyarakat dan lingkungan terkait eksistensi PMII Kota Semarang menjadi pemacu semangat structural pada pengurus cabang dalam memanageri kaderisasi guna pengembangan anggotanya baik di internal PMII itu sendiri maupun yang terkait dengan bagaimana anggota PMII dapat memaksimalkan kemampuannya dalam bersosial masyarakat. Kekayaan pemikiran serta dinamika organisasi yang sehat dengan berbagai macam terobosan dan inovasi mutlak dibutuhkan guna kemajuan PMII ke depannya.

Kekuatan gerakan mahasiswa menjadi penting sebagai sebuah kekuatan perubahan. Kapasitas intelektual yang memadai serta semangat gerak dengan idealisme yang dipegang merupakan modal sekaligus kekuatan utama untuk perubahan masyarakat, agama, bangsa dan negara. Dan tidak mungkin perubahan terjadi jika semangat persatuan dalam konteks diatas jika tidak dimulai dari gerakan kaderisasi yang baik. Termasuk bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang notabene mempunyai tujuan serta paradigma tertentu dalam gerakannya.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan amanah kepada segenap pemerintah negara dalam memberikan perlindungan untuk seluruh rakyat , tumpah darah dan dalam upaya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari hal tersebut sudah jelas bahwa pemerintah dan segenap unsur perangkatnya serta dorongan serta partisipasi masyarakat memiliki peran yang signifikan, tugas dan tanggung jawab besar dalam rangka terealisasinya proses pembelajaran

dan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun pembelajaran dan pendidikan bukanlah satu-satunya unsur mutlak untuk menuju ke arah perwujudan amanah UUD 1945 tersebut. Akan tetapi dapat dilihat bahwa pendidikan menjadi unsur terpenting dalam terciptanya perubahan dan perkembangan suatu agama, nusa dan bangsa. Karena disadari ataupun tidak, pendidikan merupakan salah satu standar yang dapat diukur apakah suatu agama, bangsa dan negara itu maju dan berkembang atau malah sebaliknya.

Pemerintah bukanlah satu-satunya dalam memaksimalkan peran dalam rangka perwujudan ide dan cita-cita UUD 45 tersebut. Karena persoalan pendidikan bukanlah satu-satunya tanggung jawab pemerintah. Melainkan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Semuanya memiliki peran dan tanggung jawab sebagai partnership untuk mengawal terwujudnya pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai bagian dari sub turunan rakyat Indonesia, memiliki kewajiban yang sama untuk mengawal pendidikan tersebut.

PMII Cabang Kota Semarang yang sampai sekarang berkomitmen sebagai organisasi kaderisasi (pendidikan) harus mampu mengorientasikan seluruh aktifitas organisasinya demi terwujudnya tujuan organisasi PMII itu sendiri. Proses kaderisasi harus mampu menyentuh aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan nilai) dan psikomotorik (keterampilan) kader dan anggota yang berada di bawah naungannya. Maka harus dapat dipastikan bahwa seluruh Pendidikan formal, informal dan non formal PMII, baik itu MAPABA, PKD, dan PKL harus semaksimal mungkin diarahkan demi terwujudnya ketiga aspek diatas dan dengan sendirinya tujuan luhur PMII dapat tercapai secara maksimal sehingga kader *ulul albab* akan mampu terbentuk. *Ulul albab* merupakan citra diri kader PMII yang didefinisikan sebagai orang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan (olah pikir) dan ia pun tak lupa mengayun dzikir. Karenanya dengan sangat jelas citra *ulul albab* disarikan dalam moto “Dzikir, fikir dan amal sholeh”.<sup>27</sup> Konstruksi ini didasarkan atas beberapa ayat al-Qur'an seperti al-Baqarah 179, 197, 269; Ali Imran 190; al-Ma'idah 100; al-Ra'd 19; Ibrahim 52; Shaad 29, 43; az-Zumar 9, 17-18, 21; al-Mu'min 53-54; at-Talaq 10.

Secara lebih terperinci, Eman Hermawan mencirikan kader *ulul albab* dalam lima kriteria.<sup>28</sup> *Pertama*, berkesadaran historis primordial atas relasi Tuhan-manusia-alam. Hal ini dibangun berdasarkan atas kesadaran kritis primordial teologis bahwa (1) manusia adalah makhluk yang terikat dengan “perjanjian primordial” dengan Tuhan dan karenanya manusia selalu hidup dalam bingkai ke-Tuhan-an, (2) bahwa untuk melaksanakan perjanjian itu keberagaman manusia harus mampu mentransformasikan keyakinan dalam bentuk pemikiran atau

---

<sup>27</sup>Mustafied, *et. al.*, *Pendidikan Kritis Transformatif*, (Jakarta: PB PMII, 2001), hlm. 62.

<sup>28</sup>Eman Hermawan, *Menjadi Kader Militan: Dari Simpatisan Menjadi Militan, Dari Individu Menjadi Organizer*, (Yogyakarta: Klik®, 2000), hlm. 55-59.



filsafat hidup untuk mengelola dunia dengan segala persoalannya berdasarkan hukum-hukum sosial dan proses kesejarahan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian manusia bertanggungjawab penuh atas proses sejarah yang terjadi sebagai implementasi *khalifatullah fil ardl*.

*Kedua*, berjiwa optimis-transendental atas kemampuan pribadi mengatasi semua masalah kehidupan. Sikap ini terlahir dari jiwa ketakwaan, sementara takwa dimaknai sebagai keyakinan yang hidup di atas kesadaran transendental yang darinya akan lahir pribadi yang teguh memegang prinsip dan disertai komitmen untuk membangun suatu orde keadilan. Komitmen itu sendiri lahir dari suatu pandangan teologis yang mapan bahwa tugas manusia adalah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.

*Ketiga*, berpikir dialektis-struktural dalam melihat berbagai peristiwa sosial masyarakat. Fakta atau persoalan yang terkait dengan hukum-hukum alam dan sosial diperlukan cara berfikir dialektis yang berporos pada usaha pengembangan struktur sosial yang lebih baik melalui kerangka aksi-refleksi-aksi, dan seterusnya.

*Keempat*, bersikap kritis-proporsional menghadapi berbagai perbedaan dan pluralitas pendekatan, sudut pandang dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Salah satu karakter utama dan menonjol dari kader *ulul albab* adalah ia mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa dan fakta yang ada di tengah masyarakat. Hingga ia bisa membuat refleksi dan identifikasi masalah serta mampu menyampaikan dan menyelesaikan persoalan dengan bahasa kaumnya.

*Kelima*, bertindak transformatif-kultural. Inti dari prinsip tauhid selalu berlawanan dengan *thaghut* yang berarti kekuatan sewenang-wenang, otoriter, tiranik, atau apa-apa yang melewati batas. Perwujudannya hanya muncul jika seseorang mempunyai komitmen kemanusiaan serta mentransformasikan keyakinannya demi melawan *thaghut*.

Konstruksi ideal manusia (*ulul albab*) tersebut dengan demikian bermuara kepada gerakan sosial yang menginginkan perubahan. Sementara gerakan sosial ini tak mungkin terwujud ketika tidak ada pembacaan atau sikap kritis yang mendasarinya.

Untuk tercapainya cita-cita tersebut, maka kaderisasi harus memiliki konsep dan perangkat pendukung yang jelas, diantaranya adalah tujuan kaderisasi, pengkader, kader dan anggota, proses kaderisasi, materi kaderisasi dan metode. Walaupun demikian sebenarnya secara gamblang PMII kota Semarang telah memiliki dan telah mengimplementasikan perangkat-perangkat tersebut dengan bertahan dan komprehensif.

Pada penelitian ini akan diuraikan beberapa perangkat kaderisasi PMII Kota Semarang: *pertama*, Tujuan, Anggaran Dasar PMII sudah sangat jelas memberikan deskripsi orientasi (AD PMII Bab IV Pasal 4) yaitu tentang terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya

dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia.<sup>29</sup> Terbentuknya kader *ulul albab* yang secara komprehensif mengakumulasikan Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. *Kedua*, Pengkader, dalam PMII sering menyebut sebagai Instruktur dan senior sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman Instruktur adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendinamisasikan proses kaderisasi agar proses transformasi *knowledge* dan *value* berjalan dengan maksimal. *Ketiga*, kader, atau yang biasa disebut anggota, adalah subjek kaderisasi yang otonom atau komponen masukan dalam sistem kaderisasi, yang selanjutnya diproses dalam proses pengkaderan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan kaderisasi. *Keempat*, Proses Kaderisasi, adalah Interaksi edukatif dan proses komunikasi timbal balik antara pengkaderan dengan kader yang terarah kepada tujuan kaderisasi. Dalam Multi Level Strategi yang dimiliki PMII sudah dijelaskan alur panjang proses kaderisasi, dimana secara universal menggambarkan proses input (rekrutmen, pra pelatihan), proses (pendidikan informal, pendidikan non formal, dan pendidikan formal: MAPABA, PKD, PKL), output (terbentuknya anggota *mu'taqid*, kader mujahid dan mujtahid), *outcome* (distribusi kader). *Kelima*, Materi atau Kurikulum, adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang diarahkan pada upaya pencapaian tujuan kaderisasi. Materi atau kurikulum kaderisasi pun sudah termaktub dalam buku pedoman hasil workshop kaderisasi yang pernah didialektikakan oleh PB PMII. Secara sistematis dalam buku tersebut sudah terklasifikasikan materi-materi untuk pendidikan (formal, informal dan non formal) dalam PMII. *Keenam*, Metode, cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Oleh sebab itu, sebagai lembaga kaderisasi yang memiliki tahapan dalam prosesnya, maka PMII Cabang Kota Semarang pun sudah mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam setiap proses kaderisasinya, MAPABA dengan metode doktrinasi agar terbentuknya anggota yang yakin (*mu'taqid*) terhadap nilai-nilai yang ditawarkan PMII Cabang Kota Semarang, sedangkan PKD menggunakan metode Indoktrinasi yang diharapkan dapat terwujudnya kader mujahid, PKL menggunakan metode Partisipatoris yang harapan besarnya mampu terciptanya kader mujtahid.

Dengan demikian, PMII Kota Semarang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar atas perkembangan dan perubahan Bangsa harus mampu turut serta melakukan proses pendidikan dan kaderisasi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tipikal yang disesuaikan dengan karakter pergerakannya. Dengan proses kaderisasi yang dianggap sudah sangat ideal, diharapkan mampu menyentuh aspek kognitif dengan memberikan beberapa pengetahuan terkait kebutuhan manusia dalam mengarungi kehidupannya. Aspek afektif yang menjadikan dasar nilai dan sikap dalam rangka bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga aspek psikomotorik yang dijadikan bekal (soft-skill) bagi kader untuk menjangkau kebutuhan profesional di lingkungan kerja.

---

<sup>29</sup>Pengurus Besar Mahasiswa Islam Indonesia, *Draf Materi Kongres*: (Jakarta: 2010), hlm. 12

### C. Strategi Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang 2010-2012

#### 1. Pendidikan Formal PMII MAPABA, PKD dan PKL

Pendidikan Formal Masa adalah fase orientasi dan pengenalan awal dan berkelanjutan dalam PMII kepada mahasiswa dalam rangka rekrutmen mahasiswa untuk menjadi anggota PMII. Tujuan Pendidikan Formal dari Mapaba, PKL dan PKD adalah untuk merekrut anggota. Anggota pasca MAPABA disebut *Mu'takid*, yakni anggota yang:

- 1) Merasa butuh untuk berorganisasi
- 2) Memiliki keyakinan dan loyalitas bahwa PMII adalah organisasi mahasiswa dan organisasi mahasiswa Islam yang paling tepat untuk memperjuangkan idealisme mahasiswa;
- 3) Mengikuti *Ahlusunnah wal-Jama'ah* (ASWAJA) sebagai prinsip pemahaman, pengamalan dan penghayatan Islam Indonesia.

##### a. Penyelenggara

MAPABA diselenggarakan oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat. Penyelenggara MAPABA melalui Bidang Pengkaderan mengkoordinasi pelaksanaan MAPABA secara umum. PKD diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat atau Pengurus Cabang. Dan PKL biasanya diselenggarakan oleh Pengurus Cabang atau Pengurus Koordinator Cabang.

##### b. Surat Keputusan Keanggotaan

Surat Keputusan (SK) Keanggotaan ialah surat resmi yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pengurus Komisariat untuk melegalisasi status keanggotaan seorang mahasiswa yang telah mengikuti MAPABA. SK Keanggotaan diserahkan kepada calon anggota setelah calon anggota dibaiat menjadi ANGGOTA PMII. SK Anggota ini penting diadakan untuk mengukuhkan seorang mahasiswa sebagai Anggota PMII.

##### c. Model Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan MAPABA adalah:

- 1) *Doktrinasi*, yaitu pemahaman serta pembekalan keyakinan dan faham PMII,
- 2) *Persuasi*, yaitu pendekatan positif untuk meyakinkan dan menarik minat lebih lanjut anggota baru PMII.

##### d. Peserta

Peserta MAPABA adalah mahasiswa baru (semester pertama) atau maksimal mahasiswa semester empat. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar nantinya anggota lebih memiliki kesempatan untuk berkembang.

##### e. Kurikulum MAPABA

Berikut adalah Kurikulum Mapaba yang menjadi pedoman komisariat di Semarang:

1.	Bina Suasana	0 menit
2.	Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial (MW)	120 menit
3.	Keorganisasian PMII (MW)	120 menit
4.	Nilai Dasar Pergerakan (MW)	120 menit
5.	Islam Indonesia (MW)	120 menit
6.	Studi Gender dan Kelembagaan KOPRI (MW)	120 menit
7.	Sejarah Negara Bangsa Indonesia (MW)	120 menit
8.	Sejarah Perencanaan Pembangunan Indonesia (MP)	120 menit
9.	Antropologi Kampus (MLP)	120 menit
10.	Sejarah PMII Lokal (MLP)	120 menit
11.	Kajian Disiplin Ilmu (Fakultas/Jurusan) (MLP)	120 menit
12.	General Review dan RTL	120 menit
13.	Evaluasi	90 menit
<i>Total Waktu</i>		<i>530 menit<sup>30</sup></i>

**f. Pembaiatan Anggota**

Pembaiatan adalah acara pengambilan ikrar peserta MAPABA untuk bergabung dan bersetia dalam organisasi PMII. Pembaiatan dilakukan setelah seluruh rangkaian acara dalam kegiatan MAPABA usai dilaksanakan. Pelaksanaannya dilakukan diantara sesi terakhir dan acara penutupan.

**g. Follow Up MAPABA**

*Follow Up* atau tindak lanjut MAPABA adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan bagi Anggota Baru untuk membimbing, mengarahkan cara-cara berorganisasi dan untuk memperdalam nilai-nilai dan prinsip dasar organisasi PMII.

Kegiatan *Follow Up* terbagi dua yaitu kegiatan yang dirancang bersama melalui kesepakatan alumni MAPABA dan kegiatan *Follow Up* MAPABA yang dirancang oleh Pengurus Rayon atau Pengurus Komisariat. Untuk mengarahkan ketrampilan dan pemahaman Anggota Baru, diselenggarakan kegiatan wajib yaitu:

- 1) Sekolah Kader
- 2) Sekolah Advokasi
- 3) Sekolah Kepemimpinan
- 4) Pelatihan Manajemen Forum

*Sekolah Kader* dimaksudkan untuk membekali kader dengan kemampuan dan skill apapun yang mereka miliki, di sini dibutuhkan kepekaan dan kemampuan pengkader dalam

---

<sup>30</sup> PMII Cabang Kota Semarang, *Buku Pedoman Organisasi PMII*: (Semarang: 2010), hlm. 17

melihat kemampuan, skill dan potensi apa saja yang ada di masing-masing pribadi kader dan anggota. *Sekolah Advokasi* dimaksudkan untuk mengkaji dan memperkaya wawasan Anggota Baru mengenai pendampingan-pendampingan terhadap persoalan, konflik atau kasus yang berada di lingkungan sosial di sekitar kota Semarang, sekaligus juga pada kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada pola pikir dan pola sikap kader dan anggota dalam melihat realitas sosial yang ada. *Sekolah Kepemimpinan* dimaksudkan untuk membekali pengetahuan kader dan anggota menyangkut persoalan kepemimpinan yang ada, agar nantinya kader dapat menentukan potensi-potensi yang ada pada pribadi mereka dan tipe pemimpin seperti apa yang ada dalam karakter mereka. *Pelatihan Manajemen Forum* merupakan pelatihan pertama bagi Anggota dalam mengelola forum. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan Anggota dengan kegiatan-kegiatan formal, baik rapat maupun diskusi, serta teknik dan persiapan untuk berpartisipasi di dalamnya.

#### D. Analisis Manajemen strategis Pengkaderan PMII Cabang Kota Semarang 2010-2010

Berdasarkan pada paparan data deskripsi empiris tentang aktualisasi rekrutmen dan keanggotaan kaderisasi formal PMII Cabang Kota Semarang 2010-2012. peneliti memberikan analisa terhadap bagaimana proses manajemen pengkaderan pada setiap komponen manajemen di Pengurus PMII Cabang Kota Semarang. Untuk mempermudah pembahasan terlebih dahulu disusun dalam bentuk rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rekapitulasi Hasil Penelitian

Komponen dan Indikator	Manajemen PMII Cabang Semarang
<b>Perencanaan (<i>planning</i>)</b>	
Cara Perencanaan	Perencanaan pengembangan kader dan anggota pada kemampuan Pengurus PMII Cabang Kota Semarang dalam mendorong kader-kadernya untuk aktif berpartisipasi dalam memberikan dukungan.  Penyusunan rencana hanya berdasar pada jumlah dana yang tersedia saja dan bersifat <i>insidental</i> tanpa mempertimbangkan kemungkinan potensi kedepan.
Sifat perencanaan	Perencanaan PMII Cabang Kota Semarang masih bersifat dan bertumpu pada kepentingan dan tujuan jangka pendek, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya instan dan praktis yang muncul dari usulan dan ide-ide yang datang pada saat itu ( <i>by Accident</i> ).
Sumber perencanaan	Pengelolaan PMII Cabang Kota Semarang lebih banyak tergantung pada pengurus di level inti, seperti ketua, wakil ketua, sekjen

	sehingga perencanaan hanya sesuai dengan selera beberapa orang saja. Dimana rangkaian perencanaan dan implementasinya hanya terpusat kepada seorang pimpinan ( <i>top down</i> ).
Tahapan Perencanaan	Menyusun rencana dan merumuskan kebijakan PMII Cabang Kota Semarang dengan melibatkan semua <i>stakeholders</i> melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan visi misi</li> <li>b. Pengumpulan dan analisis data untuk menyusun rencana jangka pendek, jangka panjang dan rencana strategis.</li> </ul>
<b>Pelaksanaan dan pengorganisasian (<i>Actuating organizing</i>)</b>	
Komponen Peningkatan mutu kader	Pembinaan secara profesional melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaderan formal. Yakni jenjang pengaderan yang telah ditentukan AD/ART. Pengaderan ini berjenjang mulai MAPABA (Masa Penerimaan Mahasiswa Baru), PKD (Pelatihan kader Dasar) dan PKL (Pelatihan Kader Lanjut).</li> <li>b. Pengkaderan Non Formal. Yakni jenjang pengaderan yang ditentukan secara mandiri dari PMII Cabang Semarang seperti mengadakan forum-forum diskusi, sekolah kader, sekolah advokasi, sekolah kepemimpinan, sekolah filsafat, dan seminar-seminar pada kesempatan yang telah ditentukan sebelumnya.</li> <li>c. <i>In-service training</i> seperti mengadakan penataran atau pelatihan bidang studi, kepemimpinan, dan manajemen keorganisasian.</li> </ul>
Komponen Sarana Prasarana	Melengkapi sarana dan prasarana menunjang pelayanan yang prima dan proses pengkaderan berkualitas antara lain gedung kesekretariatan, buku-buku bacaan, sarana diskusi dan bahan pembelajaran kader.
Komponen Pendidikan kader	Mengidentifikasi sumber daya kader yang diperlukan dan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai kebutuhan organisasi.
Komponen anggota dan kader	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengelola pembelajaran guna meningkatkan kualitas anggota dan kader-kader PMII Se Kota Semarang.</li> <li>b. Menerapkan proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan Materi atau kurikulum kaderisasi yang termaktub dalam buku pedoman hasil workshop kaderisasi yang pernah didialektikakan</li> </ul>

	<p>oleh PB PMII</p> <p>c. Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan kader dalam konteks lokal Kota Semarang.</p> <p>d. Menyediakan program pengembangan untuk anggota dan kader PMII Kota Semarang.</p>
<b>Pengawasan (<i>controlling</i>)</b>	
Lembaga pelaksana	<p>Pengawasan internal adalah ketua PMII Cabang Kota Semarang secara rutin mengadakan pengawasan terhadap segenap kegiatan bawahannya.</p> <p>Pengawasan eksternal. dilakukan oleh pihak luar. Misalnya kontrol yang dilakukan senior ataupun IKA PMII sebagai lembaga yang menaungi Alumni PMII.</p> <p>Pengawasan formal: Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh PKC PMII Jawa Tengah sebagai koordinator seluruh cabang-cabang yang berada di provinsi Jawa Tengah dan kontrol PB PMII sebagai struktural tertinggi PMII di level nasional.</p>
Perihal Pengawasan	<p>Evaluasi melalui empat unsur dalam <i>Good Governance</i>:</p> <p>a. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)</p> <p>b. Transparansi (<i>Transparency</i>)</p> <p>c. Keterbukaan (<i>Openness</i>)</p> <p>d. Aturan Hukum (<i>Rule of Law</i>).</p>

## 2. Analisis Hasil Penelitian Manajemen Pengkaderan PMII Cabang Kota Semarang tahun 2010-2012

### a. Analisis perencanaan program

Implementasi dari manajemen pengkaderan di PMII Cabang Kota Semarang dalam pembangunan sumber daya manusia (anggota dan kader) dan terwujudnya pribadi kader *ulul albab* yang secara komprehensif mengakumulasikan Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. Adapun Proses Kaderisasi yang telah dijalankan PMII Cabang Kota Semarang TAHUN 2010-2012 adalah dengan Interaksi edukatif dan proses komunikasi timbal balik antara pengkader dengan kader dan anggota yang terarah kepada tujuan kaderisasi. Prosesi tersebut secara garis besar melingkupi beberapa proses, diantaranya yaitu proses input (rekrutmen, pra pelatihan), proses (pendidikan formal: MAPABA, PKD, PKL, pendidikan informal, dan pendidikan non formal). Yang mana dari berbagai proses tersebut memiliki output untuk terbentuknya anggota *mu'taqid*, kader mujahid dan *mujtahi* dan *outcome* sebagai distribusi kader. Materi atau Kurikulum dalam proses kaderisasi adalah materi-materi dan kurikulum yang telah dirumuskan serta termaktub dalam

buku pedoman dari hasil workshop kaderisasi yang pernah didialektikakan PB PMII. Secara sistematis dalam buku tersebut sudah terklasifikasikan materi-materi untuk pendidikan (formal, informal dan non formal) dalam PMII. Sebagai lembaga kaderisasi yang memiliki tahapan dalam prosesnya, maka PMII Cabang Kota Semarang pun sudah mengklasifikasikan metode yang digunakan dalam setiap proses kaderisasinya, MAPABA dengan metode doktrinasi agar terbentuknya anggota yang yakin (*mu'taqid*) terhadap nilai-nilai yang ditawarkan PMII Cabang Kota Semarang, sedangkan PKD menggunakan metode Indoktrinasi yang diharapkan dapat terwujudnya kader mujahid, PKL menggunakan metode Partisipatoris yang harapan besarnya mampu terciptanya kader mujtahid.

Dalam proses perencanaan PMII Cabang Kota Semarang melibatkan *stakeholders* PMII yaitu; Ketua PMII Cabang Kota Semarang, Struktur PMII Cabang Kota Semarang, IKA PMII, dan seluruh unsur non struktural. Adapun manajemen perencanaan pengkaderan di PMII Cabang Kota Semarang memuat tentang: target pengembangan jangka panjang, target pengembangan per tri wulan, hasil analisa diri yang mencerminkan kekuatan dan kelemahan organisasi PMII Cabang Kota Semarang dalam berbagai aspek khususnya terkait sasaran program yang akan dilaksanakan, program prioritas PMII Cabang Kota Semarang dan rincian kegiatannya, rencana anggaran yang diperlukan termasuk sumber dananya

Dari penjelasan diatas nampak bahwa PMII Cabang Kota Semarang periode 2010 sampai 2012, melalui program Manajemen Pengkaderan Organisasi Kepemudaan Strategi Kaderisasi PMII Cabang Kota Semarang Tahun 2010-2012 dalam Meningkatkan Aktivitas Mahasiswa ingin mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (anggota dan kader) dan terwujudnya pribadi kader *uhul albab* yang secara komprehensif mengakumulasikan Dzikir, Fikir, dan Amal Sholeh. PMII Cabang Kota Semarang periode 2010-2012 yang dikelola dengan manajemen yang baik dan profesional dapat dilihat melalui data input perencanaan dan output indikator keberhasilan, yang meliputi: prestasi anggota dan kader, perkembangan fisik, kondisi kader dan pengurus PMII Cabang Kota Semarang, perubahan manajemen dan usaha, dan peningkatan peran serta alumni dan masyarakat.

b. Analisis pelaksanaan program

1) Komponen peningkatan mutu pengkaderan

Tujuan akhir dari implementasi kegiatan peningkatan mutu pada anggota dan kader PMII Cabang Kota Semarang adalah: *Pertama*, PMII Cabang Kota Semarang mampu melaksanakan Materi atau kurikulum kaderisasi pun sudah termaktub dalam buku pedoman hasil workshop kaderisasi yang pernah didialektikakan oleh PB PMII. Secara sistematis dalam buku tersebut sudah terklasifikasikan materi-materi untuk pendidikan (formal,



informal dan non formal), *Kedua*, Proses Kaderisasi harus mengarah pada Interaksi edukatif dan proses komunikasi timbal balik antara pengkader dengan kader yang terarah kepada tujuan kaderisasi. *Ketiga*, berbasiskan pada kultur dan karakter PMII Cabang Kota Semarang. *Keempat*, PMII Cabang Kota Semarang tidak eksklusif, yaitu semua aspek pengkaderan dikembangkan secara terintegrasi. *Kelima*, anggota dan kader-kadernya memiliki pengetahuan dan ketrampilan baik secara akademis maupun non akademis serta berakhlak mulia yang mampu memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pembangunan bangsa dan agama secara utuh.

Pengembangan proses pendidikan dan kaderisasi di PMII Cabang Kota Semarang periode 2010-2012 dilakukan dalam bentuk penguatan konsep dan pengayaan materi pendidikan tertentu yang terintegrasi dalam waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti halnya Mahasiswa dan Tanggung Jawab Sosial, Keorganisasian PMII, Nilai Dasar Pergerakan, Sejarah PMII Lokal yang membutuhkan pemahaman lebih. Sehingga yang terjadi dalam proses kegiatan pendidikan dan kaderisasi didesain sedemikian rupa agar peserta anggota dan kader didik mampu mengoptimalkan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dilaksanakan melalui waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tujuan agar anggota dan kader mendapat kesempatan lebih, memahami dan menguasai suatu kompetensi, meningkatkan, penguasaan materi, melatih ketrampilan anggota dan kader dalam memecahkan setiap persoalan yang mereka hadapi dengan hasil akhir menciptakan kader *Ulul albab*.

Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui :

- a. Pengembangan materi dan kurikulum di tingkat lokal Kota Semarang
- b. Komponen sarana dan prasarana
- c. Komponen pegkader dan kader
- d. Komponen kelembagaan

### 3. Analisis Capaian dan Dampak Manajemen Pengkaderan PMII Cabang Kota Semarang Tahun 2010-2012

Implementasi pelaksanaan manajemen pengkaderan PMII Cabang Kota Semarang tahun 2010-2012 dapat dilihat dengan pendekatan system yang terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing mempunyai kaitan dalam suatu yang dikatakan sistem. Komponen tersebut meliputi ide gagasan atau perencanaan, proses implementasi pengkaderan, keluaran langsung atau *out put*, keluaran setelah kembali ke lingkungan (*out come*), dan keluaran yang menjadi dampak terhadap organisasi, SDM maupun lingkungan. Kinerja dari suatu program dapat dilihat dari kegiatan monitoring dan evaluasi atas ide gagasan atau perencanaan, proses, dan keluaran (*out put*, *out come*, dan *impact*). Untuk mengetahui keberhasilan suatu program pengkaderan PMII Cabang Kota

Semarang, evaluasi dan monitoring harus didasarkan pada indikator dan tolok ukur kinerja yang ditetapkan dalam renstra dan program kerja yang berbasis pada visi, misi dan tujuan.

Begitu juga dari pelaksanaan manajemen pengkaderan PMII Cabang Kota Semarang tahun 2010-2012. Pada kesimpulan dari manajemen pengkaderan yang dilaksanakan PMII Cabang Kota Semarang tahun 2010-2012 dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, mulai dari hasil langsung program, hasil setelah peserta didik atau produk PMII Cabang Kota Semarang yang digunakan pengurus PMII Cabang Kota Semarang, anggota kader, alumni dan yang lainnya, serta hasil sebagai dampak yang umumnya baru kelihatan jauh setelah program atau kegiatan PMII Cabang Kota Semarang berlangsung. Berbagai hasil tersebut dapat dikemukakan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2

*Outputs, Outcome, dan Dampak*

<b>Out-Put</b>	<b>Out-Come</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1. Nilai ideologis dan idealis PMII meningkat 2. Pengkader dan kader - Pengkader minimal di atas semester VI - 90 % pengkader memiliki kemampuan dan pemahaman yang luas terhadap materi yang mereka emban - 90 % pengkader telah melewati dan lulus PKL salah satu pendidikan formal tertinggi dalam PMII - 80/20 pengkader pria/wanita - 100% kurikulum relevan 3. Anggota dan kader - 100% anggota dan kader lulus Mapaba - 60% anggota dan kader melanjutkan ke jenjang PKD - Minat anggota	1. Penghargaan 2. Kredibilitas 3. Kepercayaan 4. Partisipasi pengurus, anggota dan kader serta masyarakat tinggi dalam berbagai bentuk 5. Keilmuan yang dimiliki pengurus dan pengkader tidak sia-sia karena proses transformasi keilmuan berjalan dengan dinamis 6. Minat masuk ke dalam struktur PMII Cabang Kota Semarang meningkat	1. PMII Cabang Kota Semarang dikenal luas terutama terhadap mitra luar organisasi 2. PMII sebagai organisasi pertama pilihan mahasiswa di tingkat universitas-universitas di Kota Semarang. 3. Masyarakat bangga dengan kegiatan yang diselenggarakan PMII 4. Semua kalangan mahasiswa dapat tertampung dalam wadah organisasi PMII. 5. Dampak terhadap internal organisasi 6. Fasilitas basecamp ataupun sekretariat PMII Cabang Kota Semarang memenuhi standar pengkaderan yang baik.

<b>Out-Put</b>	<b>Out-Come</b>	<b>Dampak</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<p>dan kader baru stabil tiap bulan cenderung meningkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memfasilitasi kegiatan-kegiatan anggota dan kader di kampusnya masing-masing.</li> <li>- prestasi positif anggota dan kader di tingkat jawa tengah</li> </ul> <p>4. Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ada renstra dan program kerja</li> <li>- Ada laporan pembukuan yang lengkap akuntabel</li> <li>- Pembiayaan memadai dan mendukung</li> <li>- Ada laporan dan evaluasi</li> <li>- Kegiatan dengan lembaga mitra</li> </ul> <p>5. Sarana prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sarana semakin lengkap dan layak</li> <li>- Memiliki ruang baca dengan buku-buku yang menunjang peningkatan</li> </ul>		

